

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan di Indonesia merupakan kemiskinan multidimensional, hal tersebut karena menyangkut semua aspek kehidupan manusia, tidak hanya persoalan rendahnya pendapatan dalam aspek ekonomi, namun juga menyangkut aspek sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Ditambah lagi kemiskinan yang ada berkaitan langsung dengan ketidakmampuan masyarakat dalam mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan dasar layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, serta sanitasi. Di Indonesia sendiri, penurunan angka kemiskinan masih menjadi permasalahan utama dalam proses pembangunan. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pembangunan di Indonesia diarahkan pada empat fokus kebijakan yang sampai saat ini masih dijalankan oleh pemerintah. Empat kebijakan yang diarahkan pada kebijakan pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan tersebut yaitu; (1) perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar; (2) perlindungan sosial; (3) penanganan masalah gizi kurang dan rawan pangan; serta (4) perluasan kesempatan berusaha.<sup>1</sup>

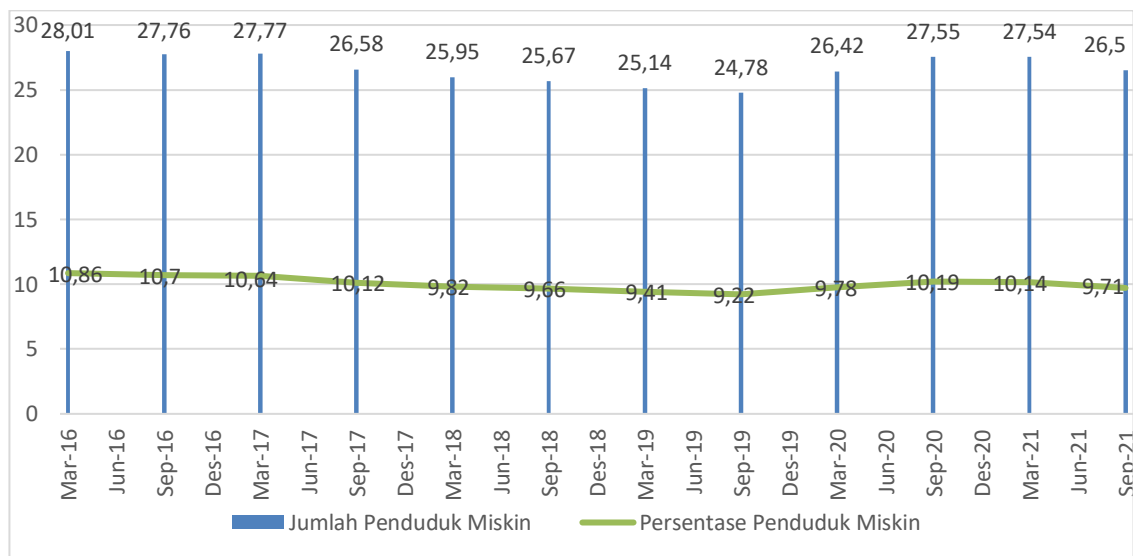
Berdasarkan data *Consumer News and Business Channel* (CNBC) Indonesia, Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan di Indonesia yakni jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2021 adalah 26,50 juta orang atau

---

<sup>1</sup> Anissa Tri Hastuti, Analisis Kemiskinan Dan Ketersediaan Infrastruktur Di Pedesaan Kawasan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2016, hlm.3.

dengan persentase 9,71%. Berikut perkembangan kemiskinan di Indonesia lima tahun terakhir yaitu dari Maret 2016 – September 2021.<sup>2</sup>

**Grafik 1.1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia**



Sumber : *cnbcindonesia.com*

Berdasarkan data dari grafik diatas, terlihat angka kemiskinan di Indonesia mulai dari Maret 2016 – September 2021 sudah mengalami sedikit penurunan. Meski mengalami kenaikan kembali pada Maret 2020 namun bisa kembali turun pada September 2021. Realisasi ini turun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan dan turun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Hal ini menunjukkan tren yang semakin bagus karena penduduk miskin semakin menurun. Namun jika dilihat persentasenya kemiskinan di Indonesia masih tergolong besar karena masih berada diatas angka sembilan, bahkan kembali menduduki angka sepuluh pada tahun 2020 sampai 2021. Untuk itu masih diperlukan upaya pemerintah dalam

<sup>2</sup> Emir Yanwardhana, “Orang Miskin RI Di 2021 Capai 26,50 Juta Orang Atau 9,71%,” *CNCB Indonesia*, last modified 2022, accessed November 1, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220117120320-4-307911/orang-miskin-ri-di-2021-capai-2650-juta-orang-atau-971#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20-%20Badan%20Pusat%20Statistik%20dan%20turun%201%20juta%20orang%20terhadap%20September%202021>

pengentasan kemiskinan di Indonesia yang mana salah satunya dengan peningkatan infrastruktur dasar dalam masyarakat.

Sumodiningrat dalam bukunya “Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa” pada tahun 2009 yang menggambarkan alur akhir dari kemiskinan di Indonesia untuk tahun 2020. Menyatakan bahwa secara tidak langsung intervensi publik berupa infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam penuntasan kemiskinan, dimana keberadaan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, selanjutnya dapat menjadi modal bagi masyarakat miskin yang akan kembali lagi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup> Kemudahan masyarakat dalam mengakses infrastruktur dasar seperti jalan raya, listrik, air minum dan fasilitas layanan dasar lainnya akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Pada saat masyarakat memiliki akses terhadap jalan raya, maka kesempatan untuk memasuki pasar akan lebih luas dan akan memberi peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih layak. Begitu juga dengan akses terhadap sanitasi yang layak akan berpengaruh pada kondisi kesehatan masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas manusia.

Pembangunan infrastruktur juga merupakan bagian penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur memiliki peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, ini mengingat gerak dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, air minum dan sanitasi, penunjang produksi

---

<sup>3</sup> Hastuti, op.cit., hlm 3

pertanian, serta infrastruktur penunjang lainnya. Oleh karena itu pembangunan sektor ini menjadi pondasi pembangunan selanjutnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga *World Economic Forum (WEF)* dalam *Global Competitiveness Report 2019*, Indonesia menempati urutan ke-50 dari 141 negara dalam hal pembangunan infrastruktur. Peringkat yang bertahan di standar rata-rata tersebut dipengaruhi kondisi infrastruktur Indonesia yang kurang berdaya saing jika dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN.<sup>5</sup>

Berikut data peringkat infrastruktur Indonesia dengan negara ASEAN lainnya :

**Tabel 1.1 Peringkat Infrastruktur Negara ASEAN**



Negara	Peringkat
Indonesia	50
Malaysia	27
Thailand	40
Philippines	64
Vietnam	67
Singapore	1
Brunei	56

Sumber : *Global Competitiveness Report 2019*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa peringkat infrastruktur Indonesia masih kalah jauh dari negara tetangga yaitu seperti Malaysia yang berada di peringkat 27 dan Singapura yang berada di peringkat pertama. Padahal Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, namun berbanding terbalik dengan kenyataan yang

<sup>4</sup> Armita, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Polejiwa Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara". Skripsi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

<sup>5</sup> Muhammad Baidarus, "Infrastruktur Masih Jadi Tumpuan Dongkrak Ekonomi Di Tengah Pandemi," DetikNews, 2021.

ada. Untuk itu masih perlu peningkatan infrastruktur Indonesia agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu berdaya saing dengan negara lain.

Dengan pembangunan infrastruktur yang masif, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Kesenjangan antar wilayah ini sangat jelas terlihat antara ketersediaan infrastruktur daerah perkotaan dan perdesaan, dimana infrastruktur di perdesaan masih jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan daerah perkotaan, bahkan jika dilihat pada perdesaan yang berada di pelosok atau perbatasan kondisi infrastrukturnya bahkan sangat minim. Terbelakangnya daerah perdesaan masih menjadi suatu permasalahan besar yang belum bisa diatasi sampai saat ini. Daerah perdesaan terutama di pedalaman masih sangat jauh dalam hal pembangunan.

Kondisi infrastruktur perdesaan yang pada umumnya masih kurang, dapat dilihat dari sebagian besar penduduk di desa tertinggal harus menempuh jarak yang cukup jauh ke pusat pemasaran baik itu ke pusat kecamatan ataupun ke pusat kabupaten, bahkan masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Selain itu, penduduk yang terlayani air minum perpipaan di perdesaan masih sangat rendah, masih banyak masyarakat yang mengambil langsung dari sumber air yang belum terlindungi. Mengingat pada kondisi tersebut maka dibutuhkan strategi penanganan penyediaan infrastruktur perdesaan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan kegiatan perekonomian di perdesaan. Sehingga pada saat ini pembangunan nasional lebih diarahkan kepada pembangunan daerah yang

diprioritaskan pada perdesaan atau lebih dikenal dengan membangun Indonesia dari desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengamanatkan terwujudnya lingkungan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam hal ini pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling melengkapi dan saling menguntungkan, hal ini sekaligus mendukung 5 (lima) visi Presiden Republik Indonesia, khususnya :

Ke-1 : Pembangunan infrastruktur terus berlanjut, interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, industri kecil, KEK, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan;

Ke-5 : APBN harus tepat sasaran, dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi & meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup>

Visi dan Misi yang digalakkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Program Kerja Tahun 2019-2024 mencakup lima target visi yaitu adanya harapan serta dorongan yang lebih kepada Indonesia untuk dapat produktif, fleksibel, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dimasa mendatang. Salah satu dari lima arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi *Nawacita*

---

<sup>6</sup> Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan PISEW Tahun 2022.

dan pencapaian sasaran Visi Indonesia tahun 2045 yaitu penekanan pada pembangunan infrastruktur.<sup>7</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk pencapaian target prioritas nasional dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Guna mewujudkan arah kebijakan strategis tersebut, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasikan sebuah kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman dengan pola pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang terdiri dari beberapa program yaitu:

- a. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas)
- b. Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)
- c. Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (Sanitasi LPK)
- d. Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R)
- e. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

---

<sup>7</sup> Reporter Berita Utama, "5 Visi Dan Misi Presiden Jokowi Periode 2019-2024," *Harian Indonesia*, last modified 2019, accessed November 15, 2022, <https://www.harianindonesia.id/berita-utama/5-visi-dan-misi-presiden-jokowi-periode-2019-2024.html>.

f. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Berdasarkan peraturan tersebut, guna memaksimalkan anggaran yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terutama di bagian Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka dilakukan pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, pengembangan penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, pengembangan sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan. Kemudian beberapa bentuk kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman tersebut dilaksanakan melalui beberapa program yang salah satunya yaitu program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) adalah salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, dengan membangun baru atau meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan permukiman perdesaan, yang bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah sehingga masyarakat di perdesaan berdaya dan mampu mengelola sumber daya lokal yang ada guna meningkatkan ekonomi rumah tangganya. Selain itu melalui program



PISEW juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, serta penguatan institusi lokal di tingkat desa.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengalaman dalam pembangunan permukiman pada kawasan perdesaan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memandang perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman dalam skala perdesaan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan. Melalui Program PISEW diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan keterbelakangan di perdesaan.

Program PISEW telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah merupakan sebuah program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pelaksanaannya langsung dari pemerintah pusat. Program PISEW ini dialokasikan kepada kabupaten tepatnya pada kecamatan atau desa yang berpotensi, khususnya pada desa yang berbasis agropolitan namun masih terkendala dengan infrastruktur penunjang dalam pemanfaatan potensi yang ada tersebut. Bentuk infrastruktur yang dibangun dalam program PISEW yaitu :

1. Infrastruktur transportasi
2. Infrastruktur air minum dan sanitasi
3. Infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri

---

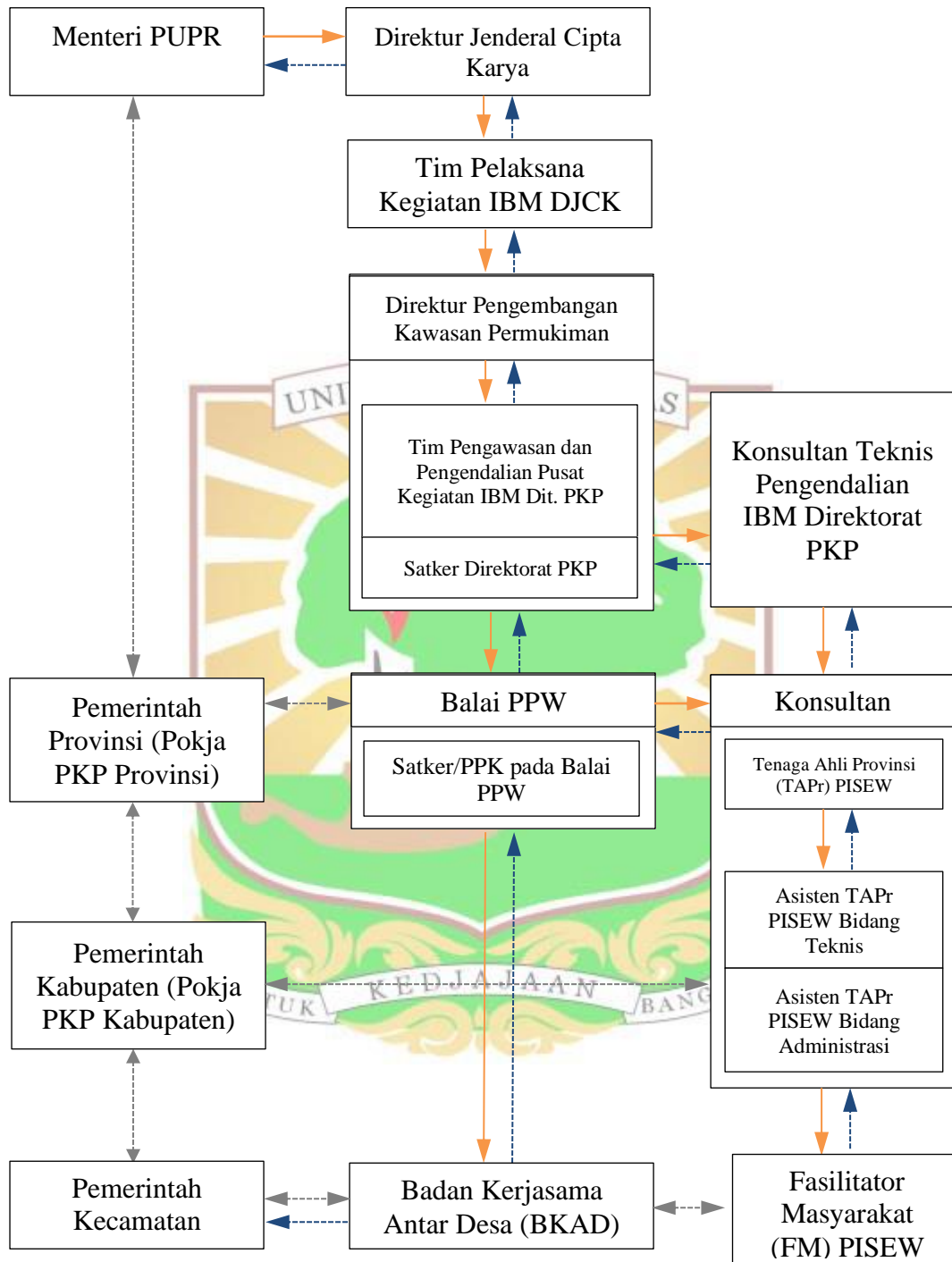
<sup>8</sup> Ermawati, Adji Suradji Muhammad, and Nazaki, "Implementasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun," *Student Online Journal (SOJ) Universitas Maritim Raja Ali Haji* 02 (2021): 899–910.

4. Infrastruktur peningkatan prasarana pendukung pemasaran pertanian, peternakan, perikanan, industri, dan pendukung kegiatan pariwisata.

Program PISEW merupakan sebuah program yang berbentuk lintas sektoral dan melibatkan banyak aktor pelaksana, dimana nagari/desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat saling berhubungan mulai dari penetapan lokasi, verifikasi data, sampai pelaksanaan, dan pelaporan program PISEW. Adapun secara ringkas struktur organisasi atau penyelenggara dari Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ini dapat dilihat dari gambar berikut :



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kegiatan PISEW**



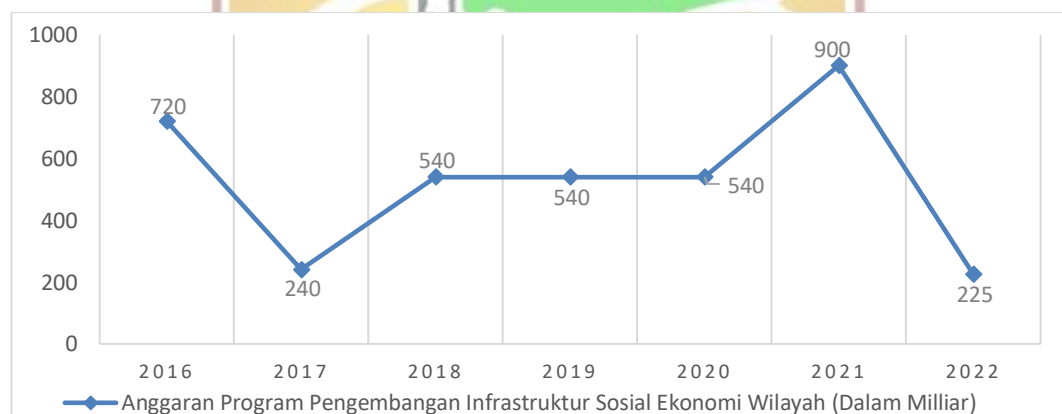
Keterangan :   
→ Pengendalin   
← Koordinasi   
→ Pelaporan

Sumber : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan PISEW Tahun 2022

Sasaran dari Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ini adalah masyarakat pelaku usaha kecil terutama pengusaha komoditas unggulan, masyarakat pekerja dalam pembangunan infrastruktur, dan masyarakat umum pengguna infrastruktur yang dibangun. Sehingga dengan hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Program PISEW merupakan sebuah program yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahun program PISEW ini selalu dianggarkan dalam APBN yang dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. 2 Anggaran Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah**



Sumber : <https://pu.go.id>, hasil olahan peneliti 2022

Pada Grafik 1.2 diatas dapat dilihat bahwa penganggaran untuk program PISEW tahun 2016 yakni Rp. 720 Miliar. Meski sempat turun pada tahun 2017, namun untuk tahun selanjutnya pemerintah terus menambah anggaran PISEW, dimana penganggaran terbesar adalah pada tahun 2021 yakni sebesar Rp. 900

<sup>9</sup> Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan PISEW Tahun 2022

Milliar. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah terus meningkatkan upaya dalam mengatasi masalah di bidang pembangunan infrastruktur untuk penuntasan kemiskinan. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan anggaran karena adanya pengurangan lokasi sasaran yang ditetapkan Kementerian PUPR dan pengurangan besaran bantuan per kecamatannya, dimana pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 600.000.000,00 per kecamatan menjadi Rp. 500.000.000,00 per kecamatan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 sebanyak 139 kabupaten di Indonesia ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Program PISEW yang tersebar di 450 kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :



**Tabel 1. 2 Lokasi Sasaran Program PISEW tahun 2022 di Indonesia**

No.	Provinsi	Jumlah Sasaran	
		Kabupaten	Kecamatan
1.	Aceh	10	66
2.	Sumatera Utara	8	24
3.	Sumatera Barat	3	6
4.	Riau	6	12
5.	Kepulauan Riau	3	5
6.	Jambi	4	5
7.	Sumatera Selatan	4	11
8.	Lampung	3	8
9.	Banten	4	10
10.	Jawa Barat	9	30
11.	Jawa Tengah	17	75
12.	DI Yogyakarta	1	1
13.	Jawa Timur	18	61
14.	Bali	2	2
15.	Nusa Tenggara Barat	3	7
16.	Kalimantan Barat	10	32
17.	Kalimantan Timur	4	13
18.	Sulawesi Utara	3	6
19.	Sulawesi Tengah	2	4
20.	Sulawesi Selatan	17	54
21.	Sulawesi Tenggara	7	15
22.	Papua	1	3

Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 347/KPTS/M/2022 (Diolah oleh peneliti, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.2. menjelaskan bahwa hanya 22 provinsi di Indonesia yang melaksanakan Program PISEW. Dari 416 kabupaten yang ada di Indonesia, hanya 139 kabupaten yang mendapatkan Program PISEW. Dan dari 7.094 kecamatan yang ada di Indonesia hanya 450 kecamatan yang tercakup dalam pelaksanaan PISEW tahun 2022.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang bertekad untuk menekan angka kemiskinan melalui peningkatan pembangunan infrastruktur. Hal ini termasuk kedalam salah satu misi Gubernur Sumatera Barat yaitu

meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mencapai 370,67 ribu orang atau setara dengan 6,63 persen.

Semenjak tahun 2016 Provinsi Sumatera Barat sudah melaksanakan Program PISEW di beberapa kabupaten. Hingga saat ini telah terlaksana 7 tahun berjalan Program PISEW di Provinsi Sumatera Barat. Berikut sebaran lokasi sasaran Program PISEW di Provinsi Sumatera Barat:

**Tabel 1.3 Sebaran Lokasi Sasaran Program PISEW di Provinsi Sumatera Barat**

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Sasaran	
		Kabupaten	Kecamatan
1	2016	2	14
2	2017	4	8
3	2018	9	41
4	2019	7	26
5	2020	7	23
6	2021	3	9
7	2022	3	6

*Sumber : Olahan Peneliti, 2022*

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas Provinsi Sumatera Barat melakukan Program PISEW setiap tahunnya yang tersebar di beberapa kabupaten dan kecamatan. Untuk penentuan penetapan kawasan Program PISEW ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada tahun 2022 sebanyak 3 Kabupaten di Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 347/KPTS/M/2022 mendapatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial

Ekonomi Wilayah, yang tersebar di 12 Jorong pada 6 kecamatan. Berikut daftar lokasi pelaksanaan Program PISEW tahun 2022 di Sumatera Barat:

**Tabel 1.4 Daftar Lokasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2022 di Sumatera Barat**

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Nagari	Jorong
1.	Solok	Lembah Gumanti	Sungai Nanam	Lipek Pageh Parak Tabu
		Lembang Jaya	Selayo Tanang Bukik Sileh	Taratak Panas Taratak Baru
		Kubung	Saok Laweh	Kapalo Koto Bungo Tanjung
2.	Sijunjung	Kupitan	Pamuatan	Pamuatan Barat Pamuatan Timur
		Koto VII	Padang Laweh	Taratak Betung Bukik Gombak
3.	Dharmasraya	Pulau Punjung	Sungai Dareh	Sungai Dareh Koto Tengah

*Sumber : Hasil Olahan Peneliti Tahun 2022 Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 347/KPTS/M/2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Solok merupakan kabupaten dengan kecamatan terbanyak yang tercakup dalam Program PISEW tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat, yakni sebanyak 3 kecamatan. Sedangkan Kabupaten Sijunjung 2 kecamatan dan Dharmasraya hanya 1 kecamatan.

Upaya peningkatan pembangunan infrastruktur demi penuntasan kemiskinan di Kabupaten Solok menjadi salah satu target utama pemerintah Kabupaten Solok yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026. Selain itu, Infrastruktur di Kabupaten Solok penting



dibangun disebabkan kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari kebutuhan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur adalah fasilitas fisik beserta layanannya yang diadakan untuk mendukung bekerjanya sistem sosial ekonomi agar menjadi lebih berfungsi sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai masalah. Apalagi Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki banyak potensi baik dari segi pertanian, perikanan, perkebunan, bahkan juga kaya akan kawasan wisata dan merupakan kabupaten yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi beras terbesar di Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Berek Solok.

Namun dengan banyaknya potensi yang ada tersebut belum dapat membuat masyarakat di Kabupaten Solok mencapai pada titik kesejahteraan. Hal tersebut dapat dilihat dari data kondisi sosial ekonomi Kabupaten Solok pada tabel berikut:

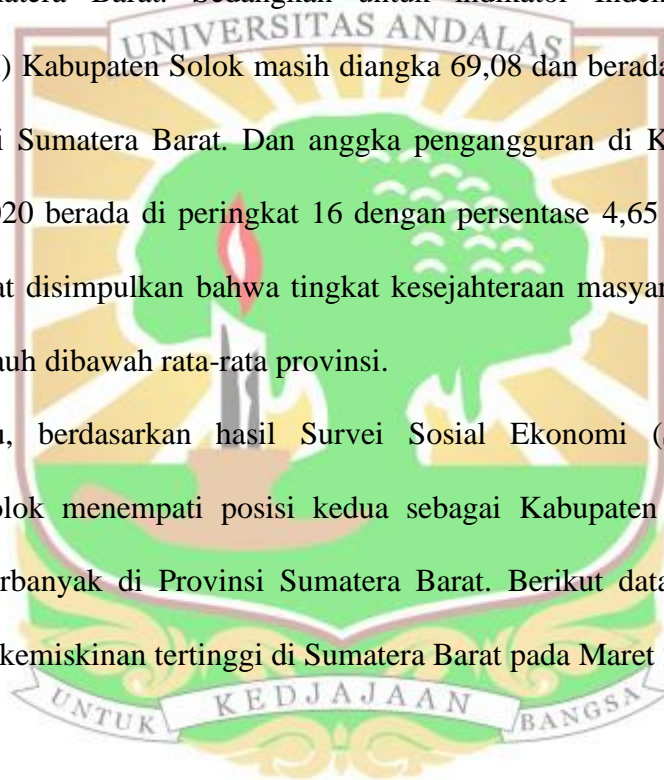
**Tabel 1.5 Kondisi Sosial dan Ekonomi Kabupaten Solok**

Rincian	Tahun		
	2018	2019	2020
<b>SOSIAL</b>			
Penduduk	371.105	373.414	391.497
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,74%	0,75%	1,17%
Angka Harapan Hidup	67,95	68,34	68,58
Angka Melek Huruf	99,72%	99,44%	98,96%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,10%	70,60%	74,64%
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,12%	4,72%	4,65%
Penduduk Miskin	32,89	29,74	29,28
Persentase Penduduk Miskin	8,88%	7,98%	7,81%
Gini Rasio	0,303	0,285	0,277
Indeks Pembangunan Manusia	68,60	69,08	69,08
Angka Harapan Lama Sekolah	13,02	13,03	13,04
Rata-rata Lama Sekolah	7,84	7,85	7,86
<b>EKONOMI</b>			
Produk Domestik Bruto (PDB)	12.653,86	13.578,37	13.511,12
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,19%	5,04%	-1,12%
Pengeluaran per Kapita	10.035	10.309	10.171

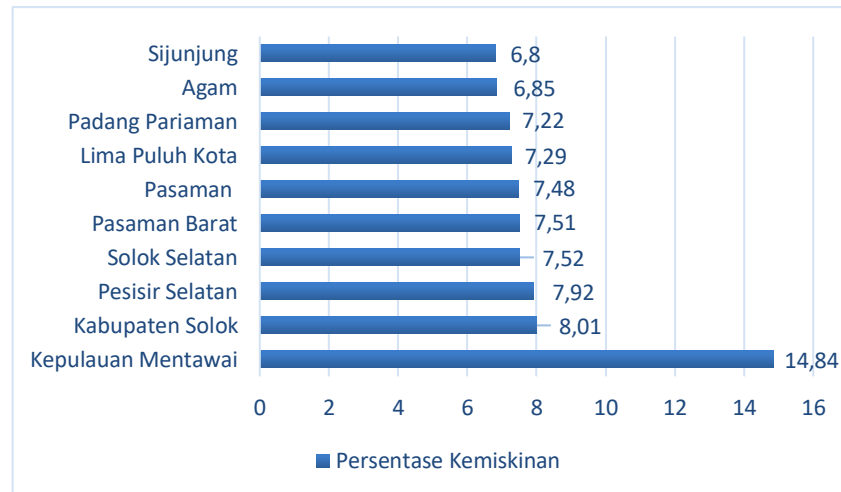
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari aspek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok masih tergolong rendah. Dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok pada tahun 2020 yakni -1,12 persen yang mana angka ini berada pada peringkat 4 terbawah di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya PDRB per kapita yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok pada tahun 2020 sebesar Rp. 26,07 juta dan ini berada pada peringkat 15 di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok masih diangka 69,08 dan berada pada peringkat 14 di Provinsi Sumatera Barat. Dan angka pengangguran di Kabupaten Solok pada tahun 2020 berada di peringkat 16 dengan persentase 4,65 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok masih jauh dibawah rata-rata provinsi.

Selain itu, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2021, Kabupaten Solok menempati posisi kedua sebagai Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Berikut data 10 Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat pada Maret 2021 :



**Gambar 1.2 10 Kabupaten dengan Angka Kemiskinan Terbanyak di Sumatera Barat pada Maret 2021**



*Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2022*

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Kepulauan Mentawai tercatat sebagai Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat yakni sebesar 14,84% atau setara 14,31 ribu jiwa dari total populasi yang ada. Selanjutnya disusul oleh Kabupaten Solok yakni mencapai 8,01%, hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh ketersediaan infrastruktur, karena secara tidak langsung ketersediaan infrastruktur berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok.

Melihat pada tingkat kesejahteraan Kabupaten Solok yang masih rendah maka diperlukan upaya dalam pemecahan permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menetapkan Kabupaten Solok sebagai salah satu daerah prioritas dalam pelaksanaan Program PISEW. Adapun sebaran lokasi yang mendapatkan Program PISEW di Kabupaten Solok 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.6 Sebaran Lokasi Sasaran Program PISEW di Kabupaten Solok**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Nagari</b>
2020	Lembah Gumanti	Alahan Panjang Sungai Nanam Salimpek
	Hiliran Gumanti	Talang Babungo Sariak Alahan Tigo
	Payung Sekaki	Supayang
	Gunung Talang	Cupak
	X Koto Singkarak	Singkarak
2021	Junjung Sirih	Sumani Koto Sani Aripan Panninggahan
	Lembah Gumanti	Sungai Nanam Salimpek
	Pantai Cermin	Surian
	Gunung Talang	Batang Arus
	IX Koto Sungai Lasi	Pianggu
	X Koto Diatas	Siberambang
	X Koto Singkarak	Koto Sani Aripan Panninggahan
2022	Lembah Gumanti	Sungai Nanam
	Lembang Jaya	Salayo Tanang Bukit Sileh
	Kubung	Saok Laweh

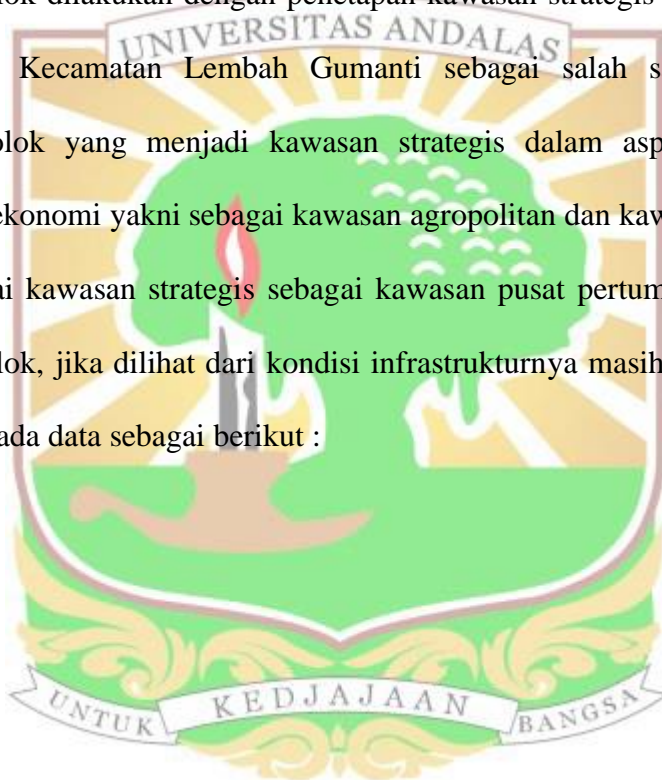
*Sumber : Olahan Peneliti, 2022*

Berdasarkan Tabel 1.6 diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Lembah Gumanti menjadi lokasi secara berkelanjutan mendapatkan Program PISEW di Kabupaten Solok, yakni pada tahun 2020, 2021, dan 2022.

Pelaksanaan Program PISEW di Kabupaten Solok berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan untuk menunjang aktivitas pertanian, yaitu jalan perkerasan rabat beton dan jalan perkerasan sirtu. Hal ini bertujuan untuk

memberi kemudahan akses petani terhadap lokasi pertanian, sehingga biaya yang ditimbulkan untuk mobilisasi aktivitas pertanian dapat ditekan dengan keberadaan jalan ini.

Penelitian ini kemudian difokuskan ke Kecamatan Lembah Gumanti saja. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012 – 2031, potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Solok dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten yang salah satunya Kecamatan Lembah Gumanti sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Solok yang menjadi kawasan strategis dalam aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi yakni sebagai kawasan agropolitan dan kawasan perkotaan. Namun sebagai kawasan strategis sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok, jika dilihat dari kondisi infrastrukturnya masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada data sebagai berikut :



**Tabel 1.7** ondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi di Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2020

KAWASAN PERTUMBUHAN EKONOMI	PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI	THN	JALAN			JEMBATAN			IRIGASI		
			BAIK (%)	SEDANG (%)	RUSAK (%)	BAIK (%)	SEDANG (%)	RUSAK (%)	BAIK (%)	SEDANG (%)	RUSAK (%)
Arosuka-Alahan Panjang-Surian	Arosuka	2016	43,25	13,90	42,84	61,54	20,00	18,46	43,48	19,85	3,46
	Alahan Panjang	2017	34,76	20,40	44,84	63,08	18,46	18,46	65,40	33,41	1,19
		2018	35,42	18,57	46,00	63,08	18,46	18,46	69,42	29,41	1,18
		2019	44,28	11,45	44,27	63,08	18,46	18,46	68,28	30,87	0,85
		2020	31,99	24,14	43,87	69,23	21,54	9,23	54,11	27,80	18,09
Arosuka-Sumani	Sumani	2016	51,29	21,57	27,14	56,63	22,89	20,48	46,94	36,70	16,36
		2017	51,28	15,32	31,49	60,24	21,69	18,07	70,85	22,73	3,44
		2018	53,18	15,32	31,49	60,24	21,69	18,07	57,23	19,96	3,12
		2019	53,03	17,40	29,57	60,24	21,96	18,07	71,07	21,47	7,47
		2020	39,45	30,08	30,48	48,19	39,76	12,05	54,75	18,09	27,16
Arosuka-Muara Panas-Kubang nan Duo- Sirukam-Batu Bajanjang	Batu Bajanjang	2016	37,92	12,56	49,52	67,74	12,90	19,35	45,43	42,07	12,50
	Muara Panas	2017	37,72	10,93	51,35	70,97	14,52	14,52	48,99	41,37	9,64
		2018	38,40	10,93	50,66	72,58	12,90	14,52	46,69	39,75	9,82
		2019	41,66	8,43	49,91	70,97	14,52	14,52	61,62	31,72	5,13
		2020	35,92	18,46	45,62	66,13	16,13	14,52	50,69	21,72	26,88

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi yang berada pada Kawasan Pertumbuhan Ekonomi seperti Kawasan Arosuka, Kawasan Alahan Panjang, Kawasan Sumani, dan Kawasan Muara Panas pada umumnya mengalami kerusakan dimana untuk jalan yang berkondisi baik masih dibawah 50 persen, sementara untuk jembatan yang berkondisi baik masih di angka sekitar 60 persen dan untuk irigasi masih di bawah 70 persen.

Melihat pada kondisi tersebut maka Kecamatan Lembah Gumanti menjadi salah satu daerah prioritas dalam pelaksanaan PISEW, karena memiliki salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan PISEW dimana merupakan wilayah yang berbasis agropolitan yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi namun dari kondisi infrastruktur pendukungnya masih kurang. Hal tersebut terbukti bahwa Kecamatan Lembah Gumanti menjadi kecamatan di Kabupaten Solok yang menjadi lokasi secara berkelanjutan mendapatkan Program PISEW seperti yang terlihat dalam tabel 1.6 diatas.

Selain itu, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Lembah Gumanti masih memiliki nagari dengan status tertinggal. Berikut beberapa nagari dengan status tertinggal di Kabupaten Solok berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) :

**Tabel 1.8 Desa dengan Status Tertinggal di Kabupaten Solok**

<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>IDM</b>
Pantai Cermin	Lolo	0,5196
Lembah Gumanti	Sungai Nanam	0,5690
	Salimpek	0,5563
Payung Sekaki	Sirukam	0,5889
	Supayang	0,5231
Tigo Lurah	Rangkiang Luluih	0,5646
	Batu Bajanjang	0,5987
	Simanau	0,5286
	Tanjung Balik	0,5112
	Sumiso	0,5441
Lembang Jaya	Limau Lunggo	0,5911
Danau Kembar	Kampung Batu Dalam	0,5798
Bukit Sundi	Dilam	0,5411
	Bukik Tandang	0,5954
IX Koto Sungai Lasi	Taruang-Taruang	0,5278
	Siaro aro	0,5364
	Sungai Durian	0,5925
	Bukit Bais	0,5715
	Koto Laweh	0,5450
Kubung	Gauang	0,5754
	Koto Hilalang	0,4991
X Koto Diatas	Katialo	0,6961
	Tanjuang Balik	0,5673
	Paninjauan	0,5850
	Bukik Kandung	0,5931
	Kuncia	0,5220
	Siberambang	0,5470
X Koto Singkarak	Koto Sani	0,5444
	Tanjuang Alai	0,5587
Junjung Sirih	Muaro Pingai	0,5592

*Sumber: Olahan Peneliti 2022 Berdasarkan Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*

Berdasarkan Tabel 1.8 diatas dapat dilihat bahwa masih banyak nagari dengan status tertinggal di Kabupaten Solok yakni berjumlah 29 nagari, dua nagari



diantaranya berada di Kecamatan Lembah Gumanti yaitu Nagari Sungai Nanam dan Salimpek.

Berdasarkan hal tersebut Kecamatan Lembah Gumanti menjadi salah satu daerah prioritas untuk pelaksanaan Program PISEW di Kabupaten Solok. Karena berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 347/KTPS/M/2022, kriteria kecamatan yang mendapatkan Program PISEW adalah desa yang diusulkan memiliki status sebagai desa berkembang, tertinggal, atau sangat tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun sesuai data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Untuk pelaksanaan Program PISEW di Kecamatan Lembah Gumanti telah dilakukan di Nagari Alahan Panjang, Sungai Nanam, dan Salimpek. Pada tahun anggaran 2022 pelaksanaan Program PISEW di Kecamatan Lembah Gumanti dilakukan di Nagari Sungai Nanam. Nagari Sungai Nanam sendiri merupakan nagari di Kecamatan Lembah Gumanti yang selalu mendapatkan Program PISEW setiap tahunnya. Selain itu berdasarkan pandangan Tim Pelaksana PISEW yang ada di provinsi menyatakan bahwa Nagari Sungai Nanam sebagai nagari terbaik dalam pelaksanaan PISEW pada tahun 2022. Hal ini dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“ Untuk pelaksanaan PISEW tahun 2022 ini, dari 6 nagari yang terdata sebagai penerima manfaat PISEW, kami menilai Nagari Sungai Nanam menjadi pelaksana terbaik. Karena dilihat dari segi manfaatnya sangat terlihat jelas bahwa itu memang benar langsung termanfaatkan oleh masyarakatnya. Karena secara itu kan pembangunannya jalan untuk pertanian, jadi itu di kiri kanan jalannya lahan pertanian masyarakat sehingga sangat berdampak positif bagi masyarakat dalam mobilisasi pertaniannya. Sedangkan untuk beberapa lokasi lainnya itu bukannya tidak berhasil, tapi dari segi manfaatnya tadi tidak sebesar di Nagari Sungai Nanam ini dan

ada juga jalan yang di bangun itu kurang terpakai oleh masyarakat. Jadi kami sangat mengapresiasi pengerjaan yang ada di Sungai Nanam tersebut karena memang dimanfaatkan secara makasimal oleh masyarakat, sehingga sesuai dengan sasaran program.” (Wawancara dengan Bapak Suharyanto selaku TAPr PISEW Pada Kamis 1 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan PISEW di Nagari Sungai Nanam sangat diapresiasi oleh tim pelaksana di provinsi dan dinilai sebagai pelaksana PISEW terbaik pada tahun 2022. Berangkat dari hal tersebut dan rekomendasi dari pihak BPPW selaku leading sektornya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Nagari Sungai Nanam.

Upaya peningkatan pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok menjadi salah satu isu utama dalam rumusan isu strategis Nagari Sungai Nanam yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2020 - 2026.

Pelaksanaan Program PISEW di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dilakukan tepatnya di Jorong Lipek Pageh dan Jorong Parak Tabu dengan infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur transportasi pertanian atau jalan usaha tani yaitu jalan perkerasan sirtu. Dimana dengan dibangunnya jalan pertanian ini akan memudahkan masyarakat khususnya dalam bidang pertanian baik itu akses masyarakat terhadap lahan pertaniannya maupun mobilisasi hasil pertanian sehingga bisa menekan upah angkut dan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini didasarkan pada wawancara dengan Ketua BKAD Nagari Sungai Nanam sebagai berikut :

“Untuk infrastruktur PISEW yang dibangun di Nagari Sungai Nanam ini adalah infrastruktur transportasi pertanian atau lebih mengarah seperti jalan usaha tani. Jadi berhubung disinikan

mayoritas masyarakatnya petani, jadi banyak masyarakat yang meminta untuk dibangun jalan ke sawah atau ladang mereka agar akses mereka kesana lebih mudah. Selain itu dengan adanya jalan itu nanti juga bisa memudahkan mobilisasi hasil pertanian masyarakat, seperti upah angkut akan lebih murah karena sudah bisa menggunakan kendaraan dan tentu juga volume angkutnya juga bertambah ketimbang diangkut satu-satu oleh orang. Sehingga hal ini akan berdampak pada peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar penerima manfaat. (Wawancara dengan Bapak Misardi Ketua BKAD Nagari Sungai Nanam, Pada 26 Mei 2023)

Berikut infrastruktur PISEW yang dibangun di Nagari Sungai Nanam

berdasarkan dokumen profil kawasan PISEW Nagari Sungai Nanam :

**Tabel 1.9 prioritas Infrastruktur PISEW yang akan dibangun**

No.	Jenis Infrastruktur	Jorong	Manfaat	Volume
1.	Jalan Perkerasan Sirtu	Lipek Pageh	Untuk memperlancar akses transportasi masyarakat	± 800 M
2.	Jalan Perkerasan Sirtu	Parak Tabu	Untuk memperlancar akses transportasi masyarakat	± 800 M

Sumber : Dokumen Profil Kawasan PISEW Nagari Sungai Nanam Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa infrastruktur prioritas yang akan dibangun dalam program PISEW di Nagari Sungai Nanam yaitu jalan perkerasan sirtu yang bertujuan untuk memperlancar akses transportasi masyarakat khususnya petani dengan total anggaran yang diberikan yakni sebesar Rp. 500.000.000,00.

Berhubung ini merupakan program dari pusat jadi agen pelaksana atau implementornya juga langsung dari pusat yakni Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR di provinsi. Kemudian untuk pelaksanaan Program PISEW di

Nagari Sungai Nanam itu sendiri dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). Selain itu dalam pelaksanaan program PISEW ini juga dibantu oleh tenaga konsultan yang akan menjadi penghubung antara provinsi dengan nagari pelaksana. Berikut daftar implementor yang terlibat beserta tupoksinya :

**Tabel 1.10 Tupoksi Masing-masing Implementor Terkait PISEW**

No.	Implementor	Tupoksi
1.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai perpanjangan Kementerian PUPR di Provinsi yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan PISEW</li> <li>- Sebagai pengawas dan penanggungjawab utama program.</li> </ul>
2.	Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman (PPK PKP)	<p>Merupakan sub bidang yang ada di Balai Prasarana Permukiman Wilayah yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksanaan program PISEW</p> <p>Tugas PPK meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui POKJA PKP Provinsi dan POKJA PKP Kabupaten/Kota serta Camat dan Pemerintah Desa/Nagari terkait penyelenggaraan kegiatan PISEW</li> <li>- Melakukan rekrutmen Tenaga Ahli Provinsi PISEW, Asisten Tenaga Ahli Provinsi PISEW, dan Fasilitator Masyarakat, melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai peruntukan dalam DIPA</li> <li>- Mendokumentasikan SP2D dan melaporkan kepada Tim Pengawasan dan Pengendalian Pusat</li> <li>- Membuat dan menyampaikan laporan (progres keuangan dan fisik) dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI), IE-Monitoring</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan keterisian dan kelengkapan data dalam Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Laporan Keuangan dan Aset (SILK-A) PISEW</li> <li>- Menyampaikan laporan progres penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit dan evaluasi kepada Tim Pengawasan dan Pengendalian Pusat.</li> </ul>
3.	<p>Konsultan atau Tenaga Pendukung Kegiatan</p> 	<p>1) Tenaga Ahli Provinsi PISEW (TAPr PISEW)</p> <p>Memberikan fasilitasi manajemen kegiatan kepada PPK PKP pada satker pelaksana PPW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu koordinasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Pokja PKP Kabupaten dalam pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan di lokasi sasaran</li> <li>- Memberikan bimbingan dan melakukan pengendalian secara intensif terhadap kinerja Fasilitator Masyarakat (FM) PISEW agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik</li> <li>- Melaporkan seluruh kegiatan kepada Balai PPW melalui PPK PKP pada satker pelaksana BPPW</li> </ul> <p>Mengkoordinir dan mengendalikan kinerja Asisten TAPr PISEW serta pembinaan FM PISEW dalam setiap tahapan kegiatan PISEW.</p> <p>2) Asisten Tenaga Ahli Provinsi PISEW (Asisten TAPr PISEW)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu koordinasi dan pembinaan pada kabupaten terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan di lokasi sasaran.</li> <li>- Bertanggung jawab terhadap kinerja Fasilitator Masyarakat, melalui bimbingan dan pengendalian secara intensif.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tahap pra dan pasca konstruksi fisik, bertanggung jawab terhadap kinerja pelaporan administrasi keuangan dan input data SILK-A secara berkala oleh BKAD serta memverifikasi data untuk siap di upload ke SIM IBM Direktorat PKP</li> <li>- Melaporkan seluruh kegiatan kepada Tenaga Ahli Provinsi PISEW.</li> </ul> <p>3) Fasilitator Masyarakat (FM) PISEW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai pendamping masyarakat Membantu BKAD dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan sampai pelaporan</li> <li>- Sebagai penghubung antara provinsi ke nagari</li> </ul>
4.	Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Sebagai pelaksana atau penanggung jawab program di Nagari.

Sumber : *Olahan Peneliti 2023, Berdasarkan Buku Petunjuk Teknis PISEW 2022*

Proses pelaksanaan Program PISEW di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok diawali dengan tahap pengusulan wilayah. Pengusulan wilayah terdiri dari dua bentuk yaitu pengusulan wilayah oleh anggota dewan yakni dari Komisi V DPR RI melalui dana aspirasinya dan pengusulan wilayah langsung dari Pemerintah Daerah. Namun dalam pengusulan wilayah ini yang lebih diprioritaskan adalah usulan wilayah dari anggota dewan. Sehingga pola penyebaran lokasi Program PISEW tidak merata, karena anggota dewan lebih memprioritaskan daerah pada daerah pilihannya. Hal tersebut didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Provinsi PISEW di PPK PKP

Sumbar pada Kamis, 1 Desember 2022, Pukul 16.30 yakni sebagai berikut :

“Besarnya pengaruh politik dalam pelaksanaan PISEW ini, anggota dewan yang ada tentu memprioritaskan daerah pada daerah pilihannya terlebih dahulu. Bukannya tidak mau mengusulkan wilayah di luar dapilnya, akan tetapi untuk wilayah pilihannya

saja masih kurang, belum semua tercakup. Jadi kecil kemungkinan untuk daerah di luar dapilnya untuk mendapatkan program ini. Sedangkan untuk pola penyebaran lokasi PISEW ini memang kurang merata, selain besarnya pengaruh politik tadi, juga karna adanya keterbatasan anggaran dan lokasi yang di tetapkan Kementerian.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa besar pengaruh politik dalam pelaksanaan Program PISEW ini. Menurut pandangan Van Meter dan Van Horn lingkungan eksternal seperti politik dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan atau program.

Selanjutnya tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang akan menjadi pelaksana Program di Kecamatan atau Nagari yang dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Pemerintahan Desa. Selain itu, pada tahap ini juga dibentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Provinsi dan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Kabupaten yang diajukan atau direkomendasikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perencanaan dan/atau pembangunan infrastruktur. Untuk Pokja Provinsi akan ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Satuan Kerja BPPW, Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman (PPK PKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Pokja Kabupaten akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Tim Pokja Kabupaten Solok terdiri dari Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Solok. Selain itu, pada tahap ini juga dibentuk kelembagaan pendukung yang terdiri dari Tenaga Ahli Provinsi dan Asisten Tenaga Ahli, serta Fasilitator Masyarakat (FM) untuk masing-masing kecamatan.

Tujuan pembentukan beberapa kelompok pelaksana diatas karena Program PISEW ini lintas sektoral, dimana dalam pelaksanaannya tidak diserahkan ke daerah sehingga dalam koordinasinya tetap mulai dari pemerintah pusat sampai ke desa/nagari. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Program PISEW ini melibatkan banyak aktor atau multi-aktor, sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan terjadinya miskomunikasi dalam pelaksanaan program. Terlebih lagi aktor-aktor yang terlibat tidak berada pada satu instansi yang sama, akan tetapi dari instansi yang berbeda. Selain itu, alur komunikasi yang panjang akan memperparah munculnya dampak miskomunikasi. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan IBM di PPK PKP Sumatera Barat pada tanggal 13 Desember 2022, pukul 09.00 WIB yang menyatakan bahwa :

“Memang benar program ini melibatkan banyak aktor dan itu juga menjadi salah satu tantangannya yang dapat berujung pada terjadinya miskomunikasi, hal tersebut karena masing-masing instansi tentu memiliki cara pandang dan pendapat yang berbeda-beda, serta sikap aparat yang terkadang juga mengedepankan ego masing-masing akan mempersulit jalannya program.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pada pelaksanaan Program PISEW ini mengalami kendala terhadap komunikasi antar organisasi terkait karena multi aktor. Menurut Van Meter dan Van Horn komunikasi antar organisasi harus



diperhatikan, jika dalam komunikasi terdapat ketidaksamaan pendapat maka akan meningkatkan persentase kegagalan dalam implementasi kebijakan, serta untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan atau program diperlukan salah satunya koordinasi dan kerjasama yang baik antar aktor pelaksana.

Selain menimbulkan dampak miskomunikasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, sehingga menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel dan tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap implementasi program. Hal tersebut juga diperkuat dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa, aspek yang memengaruhi dalam proses implementasi terkait struktur birokrasi adalah kompleksitas struktur birokrasi dan rentang kendali di dalam birokrasi pelaksana. Struktur birokrasi yang kompleks dan rentang kendali yang terlalu panjang akan menghambat kelancaran penyampaian informasi.

Pada tahap persiapan pelaksanaan Program PISEW, Pokja Kabupaten Solok berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat yakni dengan camat, fasilitator masyarakat, dan BKAD dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk penyamaan pemahaman konsepsi terkait pelaksanaan program. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu tahap perencanaan dilakukan pertemuan kecamatan yang dihadiri oleh unsur-unsur dari kecamatan, pemerintahan nagari, BKAD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kelompok/organisasi masyarakat setempat dengan ketentuan 30% peserta undangan adalah perempuan. Namun temuan awal peneliti dalam

pertemuan kecamatan ini tidak semua unsur masyarakat hadir dan untuk 30% dari peserta undangan adalah perempuan tidak terpenuhi, hal tersebut karena tidak semua masyarakat memenuhi undangan.

Dalam pertemuan kecamatan ini dilakukan beberapa kegiatan seperti pengenalan program, penggalian potensi kawasan, penggalian rencana infrastruktur, dan setelah itu dilakukan survei kawasan. Dalam survei kawasan dilakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi kawasan, kondisi kependudukan, dan kondisi pelayanan dasar sarana dan prasarana hingga permasalahan yang dihadapi. Dengan menganalisis potensi, permasalahan dan kendala yang ada, maka selanjutnya ditentukan infrastruktur apa yang akan dibangun. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dimuat dalam dokumen profil kawasan yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan apakah penetapan infrastruktur yang akan dibangun sudah sesuai dengan ketentuan program atau tidak.

Temuan awal peneliti bahwa salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) adalah penolakan dari masyarakat. Penolakan tersebut terjadi karena beberapa hal seperti lokasi dan jenis infrastruktur yang dibangun tidak sesuai dengan permintaan masyarakat serta permasalahan pembebasan lahan sehingga sering juga terjadi konflik masyarakat. Pernyataan tersebut didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan Penanggungjawab Kegiatan IBM PISEW di PPK PKP Sumatera Barat pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 09.00 WIB yang menyatakan bahwa :

“Salah satu bentuk permasalahan yang sering ditemui sebelum pelaksanaan pembangunan adalah penolakan dari masyarakat, terkadang masyarakat tidak setuju dengan lokasi dan jenis infrastruktur yang dibangun, serta sikap keras kepala masyarakat yang sulit untuk dihadapi. Contohnya masyarakat meminta untuk pembangunan jalan ke kebun, namun itu tidak sesuai dengan target dan sasaran program, dan contoh lainnya masyarakat meminta untuk membangun infrastruktur air minum dan sanitasi tapi jika dipertimbangkan anggaran yang ada tidak akan cukup. Tetapi masyarakat tetap bersikukuh jika tidak permintaan mereka yang dibangun maka mereka tidak menerimanya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan program mengalami kendala pada lingkungan sosial karena tidak semua masyarakat merespon baik kebijakan. Menurut pandangan Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa lingkungan eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Jika lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam keadaan tidak kondusif, maka akan menjadi kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Setelah dokumen profil kawasan selesai disusun dan sudah disinkronisasikan dengan kabupaten agar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka akan dikirimkan ke Tim Pelaksana Provinsi yang kemudian akan dilakukan perjanjian kerjasama (PKS) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan BKAD, yang memuat beberapa hal seperti pihak yang terlibat, barang/jasa yang akan dihasilkan, nilai pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, serta hak dan kewajiban para pihak.

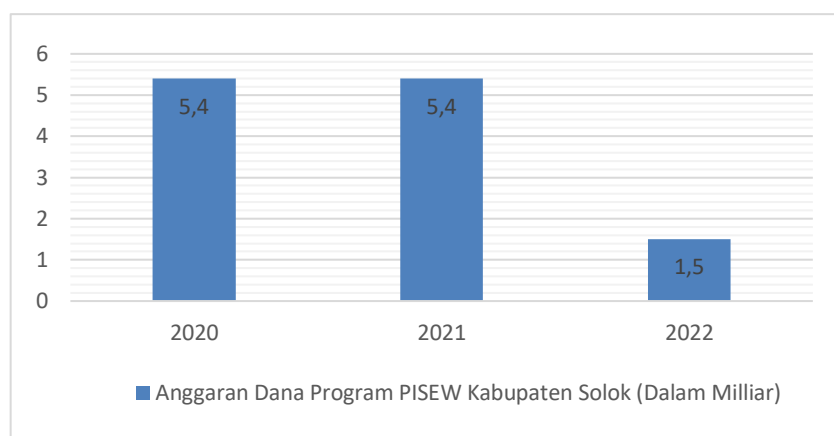
Apabila sudah dilakukan perjanjian kerjasama oleh BKAD, maka anggaran akan dicairkan yang berasal dari dana APBN yang kemudian masuk ke kas BKAD. Dana dicairkan kepada penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/KPA melalui Satker Pelaksanaan PPW. Pencairan dana dilaksanakan

oleh KPA yang nantinya bekerja sama dengan pihak bank sebagai penyalur ke rekening BKAD. Selanjutnya masing-masing kecamatan penerima Program PISEW mendapatkan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 untuk pembangunan infrastruktur. Rincian alokasi penggunaan dana bantuan yaitu paling rendah 75% untuk bahan/material dan peralatan kerja, paling tinggi 20% untuk upah tenaga kerja, dan paling tinggi 5% untuk operasional kelompok masyarakat.

Selanjutnya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sumatera Barat yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian PUPR bagian Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk daerah Provinsi Sumatera Barat selaku *leading sektor* program memiliki fungsi sebagai tim yang melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten serta sebagai tim pengawas dan evaluasi pelaksanaan Program PISEW di Provinsi Sumatera Barat. BPPW Provinsi Sumatera Barat akan menerima laporan dari seluruh daerah yang menjadi pelaksana Program PISEW salah satunya adalah laporan terkait anggaran dan realisasi pelaksanaan program yang nantinya akan dikirimkan ke Kementerian PUPR.

Pelaksanaan Program PISEW di Kabupaten Solok yang bersumber dari APBN dapat dilihat pada grafik 1.3 sebagai berikut :

**Grafik 1.3 Anggaran Dana Program PISEW di Kabupaten Solok**



*Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2022*

Berdasarkan Grafik 1.3 besar anggaran Program PISEW di Kabupaten Solok pada tahun 2020 – 2021 sama, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan karena jumlah lokasi yang ditetapkan sebagai penerima Program PISEW berkurang dari tahun biasanya serta pada tahun 2022 ada pengurangan anggaran yang ditetapkan Kementerian PUPR yakni yang biasanya Rp. 600.000.000,00 per kecamatan menjadi Rp. 500.000.000,00.

Untuk sumber daya finansial atau pendanaan ini tidak mengalami kendala atau kekurangan dana, bahkan sering terjadi pengembalian dana ke pemerintah pusat karna tidak semuanya terpakai dalam pembangunan. Namun kendala dana terjadi setelah pembangunan selesai yaitu pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan karna sumber pendanaan berasal dari masyarakat. Berdasarkan pandangan Van Meter dan Van Horn, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan atau program, yang mana salah satunya adalah sumber daya finansial.

Berdasarkan uraian fenomena diatas, asumsi peneliti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dari masyarakat sangat mempengaruhi implementasi dari Program PISEW. Hal ini dikarenakan jika lingkungan sosial masyarakat tidak menerima baik program dan kondisi politik yang tidak stabil maka pelaksanaan dari Program PISEW akan terhambat karena program ini sangat erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat.

Melihat beberapa fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan Program PISEW bahwa implementasi Program di Kabupaten Solok tidak berjalan dengan baik, untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi program tersebut.

Fenomena-fenomena yang terjadi dalam implementasi Program PISEW ini menurut peneliti berdasarkan pandangan Van Meter dan Van Horn disebabkan oleh adanya ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, sikap pelaksana, dan lingkungan. Implementasi kebijakan nantinya akan mempengaruhi dari kinerja kebijakan Program PISEW. Kinerja dari suatu kebijakan dapat menggambarkan tingkat capaian dari tujuan kebijakan, apakah hasil kebijakan telah mampu mewujudkan tujuan dari kebijakan yang telah dijalankan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kabupaten Solok?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tertuang dalam pertanyaan penelitian diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi dari program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kabupaten Solok.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Administrasi Publik dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang dalam bidang penelitian yang sama. Penelitian ini juga diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang memiliki perhatian, terutama dalam pengembangan ilmiah guna mendorong percepatan pertumbuhan masyarakat perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat dengan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah, untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan, masukan serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk segenap orang maupun instansi pemerintah yang terlibat dalam implementasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) sebagai suatu kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran dan kesenjangan antar wilayah.